

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lata Belakang Penelitian

Kedelai merupakan jenis tanaman pangan yang tergolong ke dalam tanaman polong-polongan. Biji kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan makanan pokok khas bangsa Asia bagian Timur, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga ke kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia sudah sejak lama biji kedelai dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan tahu dan tempe sebagai salah satu makanan pokok untuk menyuplai kebutuhan protein nabati.

Tahu dan tempe sudah akrab di lidah orang Indonesia sejak lama. Makanan hasil variasi olahan kacang kedelai ini pun menjadi makanan yang populer karena harganya yang relatif terjangkau untuk dikonsumsi masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah, hingga masyarakat kelas atas. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai tersebar di Asia.

Tingginya *demand* akan tempe dan tahu yang terbilang terjangkau dari sisi harga tersebut, mengakibatkan kedelai impor meningkat karena produksi kedelai di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kedelai. Pangsa produksi kedelai di Indonesia kurang dari satu persen dari produksi kedelai dunia. Produksi kedelai dunia dikuasai oleh lima negara produsen utama, yaitu Amerika Serikat, Brazilia, Argentina, Cina dan India dengan proporsi 92% produksi total kedelai dunia yang besarnya 143,2 juta ton (Sawir dan Rusastra,

2005). Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Kedelai yang diimpor Amerika mencapai 72% pasar kedelai nasional. Ketergantungan terhadap impor kedelai dari tahun ketahun dan terjadinya lonjakan harga kedelai di Indonesia akan membuat para pedagang kedelai mengalami perubahan harga kepada para pengrajin yang mengakibatkan para pengrajin mengalami kerugian bahkan terjatoh oleh utang-utang tanpa dapat berfikir untuk meningkatkan usahanya.

Fenomena tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia dibentuklah badan usaha yang menghimpun para pengrajin tempe dan tahu yang dinamakan koperasi. Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 yang mana dijelaskan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Mengenai definisi koperasi merupakan kumpulan orang-orang bukan modal dalam pelaksanaan aktivitas usahanya. Dalam pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi semakin memiliki kemampuan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi lembaga-lembaga swadaya yang mandiri yang berorientasi pada kepentingan para anggotanya.

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 menjelaskan keadaan koperasi di Indonesia yaitu:

“Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

Tujuan dari adanya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dimana kesejahteraan anggota sebagai pengikat utama agar anggota tetap berada di dalam sistem keanggotaannya. Kesejahteraan anggota dapat diukur dari besar kecilnya atau ada tidaknya manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari koperasi.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 16 tentang Perkoperasian mengatur mengenai penjenisan koperasi, salah satunya yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Salah satu koperasi produsen di Indonesia adalah Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau dikenal dengan KOPTI. KOPTI merupakan koperasi yang dibentuk oleh para perajin kecil yang bergerak dibidang produksi kedelai menjadi tahu tempe. KOPTI tersebar di beberapa wilayah yang salah satunya berada di wilayah Kota Bandung. KOPTI Kota Bandung merupakan salah satu pusat pelayanan usaha yang menyuplai kedelai kepada masyarakat Kota Bandung yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku untuk industri usahanya. Koperasi ini beranggotakan para pembuat tempe dan tahu yang ada diseluruh Kota Bandung yang mana diharapkan dalam menjalankan aktivitas usahanya KOPTI Kota Bandung harus mampu menangani bidang-bidang usahanya secara proporsional dan dengan perencanaan yang benar-benar dipertimbangkan dengan baik sehingga mampu

mendatangkan manfaat yang besar bagi anggota dan masyarakat. Berikut ini adalah perkembangan jumlah anggota KOPTI Kota Bandung Tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Keanggotaan KOPTI Kota Bandung Tahun 2015-2019

Tahun	Pengrajin Tempe (Orang)	Pengrajin Tahu (Orang)	Aktif	Tidak aktif	Jumlah (Orang)
2015	324	251	184	391	575
2016	327	246	182	391	573
2017	330	250	191	389	580
2018	330	250	189	391	580
2019	330	238	186	382	568

Sumber: RAT KOPTI Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 selama lima tahun terakhir anggota KOPTI Kota Bandung mengalami penurunan pada tahun 2016. Dari tabel di atas anggota KOPTI Kota Bandung terbagi menjadi dua yaitu anggota pengrajin tempe dan anggota pengrajin tahu. Selama lima tahun terakhir dari jumlah anggota yang ada hanya sebagai kecil yang merupakan anggota aktif.

Dalam kegiatan usahanya koperasi selain melayani anggota juga melakukan kegiatan usahanya dengan non anggota atau bisa disebut sebagai unit usaha umum. Unit usaha pengadaan kedelai sebagai usaha pokok koperasi bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan kedelai yang merupakan input utama yang dibutuhkan oleh anggota untuk menjalankan usahanya. Berikut ini adalah data pengadaan dan penjualan kedelai selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.2 Pengadaan dan Penjualan Kedelai KOPTI Kota Bandung Tahun 2015-2019

Tahun	Pengadaan Kedelai(Kg)	Volume PenjualanKedelai(Kg)	Pendapatan Kotor (Rp)	Persentase Penjualan Kedelai (%)
2015	4.000.000	3.389.108	840.688.005	84
2016	4.000.000	3.608.858	1.085.180.448	90,22

Tahun	Pengadaan Kedelai(Kg)	Volume PenjualanKedelai(Kg)	Pendapatan Kotor (Rp)	Persentase Penjualan Kedelai (%)
2017	4.200.000	3.803.306	1.176.238.193	90,55
2018	4.200.000	3.992.518	1.261.389.592	95,06
2019	4.200.000	3.970.117	1.304.070.178	94,53

Sumber: RAT KOPTI Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas persentase penjualan kedelai selama lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, akan tetapi penjualan kedelai selama lima tahun terakhir selalu tidak mencapai target yang diharapkan sehingga koperasi belum mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha utama.

Dalam melayani anggota, koperasi membutuhkan unit-unit usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. KOPTI Kota Bandung dalam menjalankan usahanya memiliki tiga unit usaha yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Unit usaha perdagangan kedelai
2. Unit usaha perdagangan non kedelai
 - a. Pengadaan ragi tempe
 - b. Kerjasama pemanfaatan GOR
 - c. Kerjasama pemanfaatan bangunan di Antapani
 - d. Kerjasama pemanfaatan pabrik tahu di jl. Terusan Suryani, dan
 - e. Kerjasama pemanfaatan pabrik tempe, kerangkeng dan gilingan tahu di Cibolerang.
3. Unit usaha simpan pinjam (USP)

Ketiga jenis usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, karena sebuah koperasi dikatakan berhasil apabila mampu

meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Mensejahterakan artinya koperasi mampu memberikan manfaat kepada anggotanya. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari koperasi memerlukan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Bukan berarti koperasi berorientasi pada modal, tetapi untuk menjalankan kegiatan operasional dan untuk memenuhi semua kebutuhan anggota modal sangatlah diperlukan. Maka modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota (Subandi, 2013: 81). Modal atau dana yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja. Modal kerja digunakan selain untuk memberikan pelayanan kepada anggota juga untuk mensejahterakan anggotanya. Modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lainnya (Kasmir, 2010: 300).

Koperasi pada dasarnya menghimpun modal kerja baik dari anggota maupun non anggota terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal kerja koperasi harus dikelola dengan efisien dan efektif.

Dalam Penggunaan modal kerja yang tidak efektif dapat menyebabkan koperasi mengalami penurunan kualitas, di mana modal kerja merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam kelangsungan koperasi. Mengingat pentingnya mengevaluasi efektivitas penggunaan modal kerja dalam upayanya untuk menghindarkan koperasi dari kesulitan keuangan seperti, kekurangan atau kelebihan modal kerja. Kekurangan modal kerja berarti jumlah modal kerja yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kegiatan koperasi, sedangkan kelebihan

modal kerja berarti menunjukkan adanya modal kerja yang menganggur (tidak produktif), sehingga dapat dikatakan dana tersebut dalam keadaan dana menganggur (*Idle Capacity*) dan hal ini akan memengaruhi tingkat pencapaian laba koperasi.

Adapun perkembangan Modal Kerja Periode 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Aset Lancar dan Utang Lancar Periode 2015-2019

Tahun	Aktiva Lancar	Utang Lancar	Rasio lancar
2015	4.816.325.541	989.461.578,88	486,76
2016	4.378.621.085	1.185.076.536,42	369,48
2017	4.061.836.381	1.218.304.298,40	333,40
2018	4.290.638.554	1.542.908.484,97	278,09
2019	4.379.529.477	1.564.938.998,50	279,85

Sumber: Pengolahan Data RAT KOPTI Tahun 2015-2019

Keterangan:

Rumus untuk mencari rasio lancar (*current ratio*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

secara umum rasio ini bisa dikatakan

baik jika nilainya mencapai 2 atau 200% (Martono dan Harjito, 2004: 55-56).

Apabila koperasi kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Koperasi yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi masalah likuiditas.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan masalah untuk memenuhi semua kewajiban *financial* yang segera dipenuhi (Riyanto, 2008: 25). Adapun menurut Munawir (2014: 31) likuiditas adalah rasio

yang menunjukkan perusahaan mampu untuk memenuhi semua kewajiban yang segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas yaitu rasio lancar dimana rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Hubungan modal kerja dengan likuiditas dalam mengukur atau menentukan tingkat likuiditas, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan pengukuran yang mapan terhadap modal kerja, karena akibat kesalahan dalam penetapan, perusahaan akan dihadapkan pada hambatan dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga agar jumlah modal kerjanya dapat mencukupi kegiatan usahanya. Apabila tingkat likuiditas tinggi maka semakin tidak efektif karena aset lancar yang terlalu besar akan berakibat timbulnya aset lancar yang menganggur, dan menuntut para manajer untuk mengambil tindakan dalam mengalokasikan aset lancar yang menganggur, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap perputaran modal kerja. Perusahaan akan bergantung pada laporan hasil dari bagian keuangan terhadap tingkat likuiditas perusahaan agar dapat melihat seberapa besar kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat diketahui seberapa besar modal kerja untuk mengalokasikan dana yang tersedia. Informasi mengenai sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting, hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat likuiditas yang dapat tercapai (Susanto: 2012). Berikut standar perhitungan rasio lancar:

Tabel 1.4 Standar Perhitungan Rasio lancar

Standar	Nilai	Kriteria
200 % - 250 %	100	Sangat Baik
175 % - < 200 % atau > 250 % - 275 %	75	Baik
150 % - < 175 % atau > 275 % - 300 %	50	Cukup Baik
125 % - < 150 % atau > 300 % - 325 %	25	Kurang Baik
< 125 % - >325 %	0	Buruk

Sumber: Peraturan Menteri Negara Kop. dan UKM RI No. 06/Per/M. KUKM/V/2006

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah aset lancar dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan kembali. Begitu pula dengan utang lancar dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja, disebabkan adanya perubahan unsur-unsur yang terdapat dalam modal kerja itu sendiri. Modal kerja berubah apabila aset lancar atau utang lancar berubah. Besar kecilnya peningkatan atau penurunan pada nilai aktiva lancar dan utang lancar dapat menyebabkan besar kecilnya nilai rasio lancar. Nilai rasio lancar rata-rata KOPTI Kota Bandung selalu di atas 250%, kondisi ini menunjukkan bahwa KOPTI Kota Bandung mampu membayar tagihan-tagihan dengan aktiva lancar yang tersedia, akan tetapi jika dilihat dari profitabilitas kurang bagus karena adanya alokasi dana yang tidak produktif atau modal kerja berada dalam kriteria *overliquid* (Ambarwati, 2015).

Overliquid adalah keadaan dimana koperasi memiliki kelebihan dana artinya jumlah dana tunai dan dana yang dapat dicairkan melimpah. Kejadian ini juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan

berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan (Kasmir, 2014: 129).

Berdasarkan rasio lancar koperasi KOPTI Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa KOPTI Kota Bandung berada dalam kriteria sangat tidak sehat yang artinya banyaknya dana yang menganggur dan harga bahan baku menjadi mahal sehingga para anggota enggan membeli bahan baku yang banyak seperti biasanya dan pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Hal ini dipengaruhi oleh harga pokok penjualan yang besar artinya koperasi memperkaya anggotanya dengan cara terus memberikan pelayanan kepada anggota tanpa memperhatikan kemampuan koperasi dalam memenuhi biaya penjualan pada unit ini. Maka koperasi harus menekan harga pokok penjualan dengan cara melakukan pembelian seefisien mungkin agar meminimalkan biaya pembelian. Dalam meningkatkan modal kerja dan kesejahteraan anggota KOPTI Kota Bandung harus meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan koperasi untuk dapat memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggota yaitu dengan mempercepat perubahan aktiva lancar menjadi modal kerja yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada koperasi KOPTI Kota Bandung serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, hal ini akan difokuskan pada struktur modal dan likuiditas dan berdampak pada manfaat ekonomi bagi anggota sehingga perlu diadakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Dalam Upaya**

Memperbaiki Likuiditas Serta Manfaatnya Bagi Anggota (Studi kasus pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia/KOPTI Kota Bandung).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang penelitian dan untuk memberi batasan-batasan pada permasalahan yang akan diambil, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan dan biaya unit usaha perdagangan kedelai dan unit perdagangan non kedelai?
2. Bagaimana kondisi Penggunaan modal kerja di KOPTI?
3. Bagaimana kondisi likuiditas di KOPTI?
4. Bagaimana efektivitas penggunaan modal kerja dalam upaya memperbaiki likuiditas pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) di Kota Bandung pada periode tahun 2015-2019 untuk pengadaan kedelai dan non kedelai?
5. Bagaimana manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota pada KOPTI Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk menggambarkan pentingnya pengaruh modal kerja terhadap likuiditas pada koperasi KOPTI Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah, memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. maksud penelitian dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan dan biaya unit usaha perdagangan kedelai dan unit perdagangan non kedelai?
2. Mengetahui bagaimana kondisi Penggunaan modal kerja di KOPTI?
3. Mengetahui bagaimana kondisi likuiditas di KOPTI?
4. Mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan modal kerja dalam upaya memperbaiki likuiditas pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) di Kota Bandung pada periode tahun 2015-2019 untuk pengadaan kedelai dan non kedelai?
5. Mengetahui bagaimana manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota pada KOPTI Kota Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

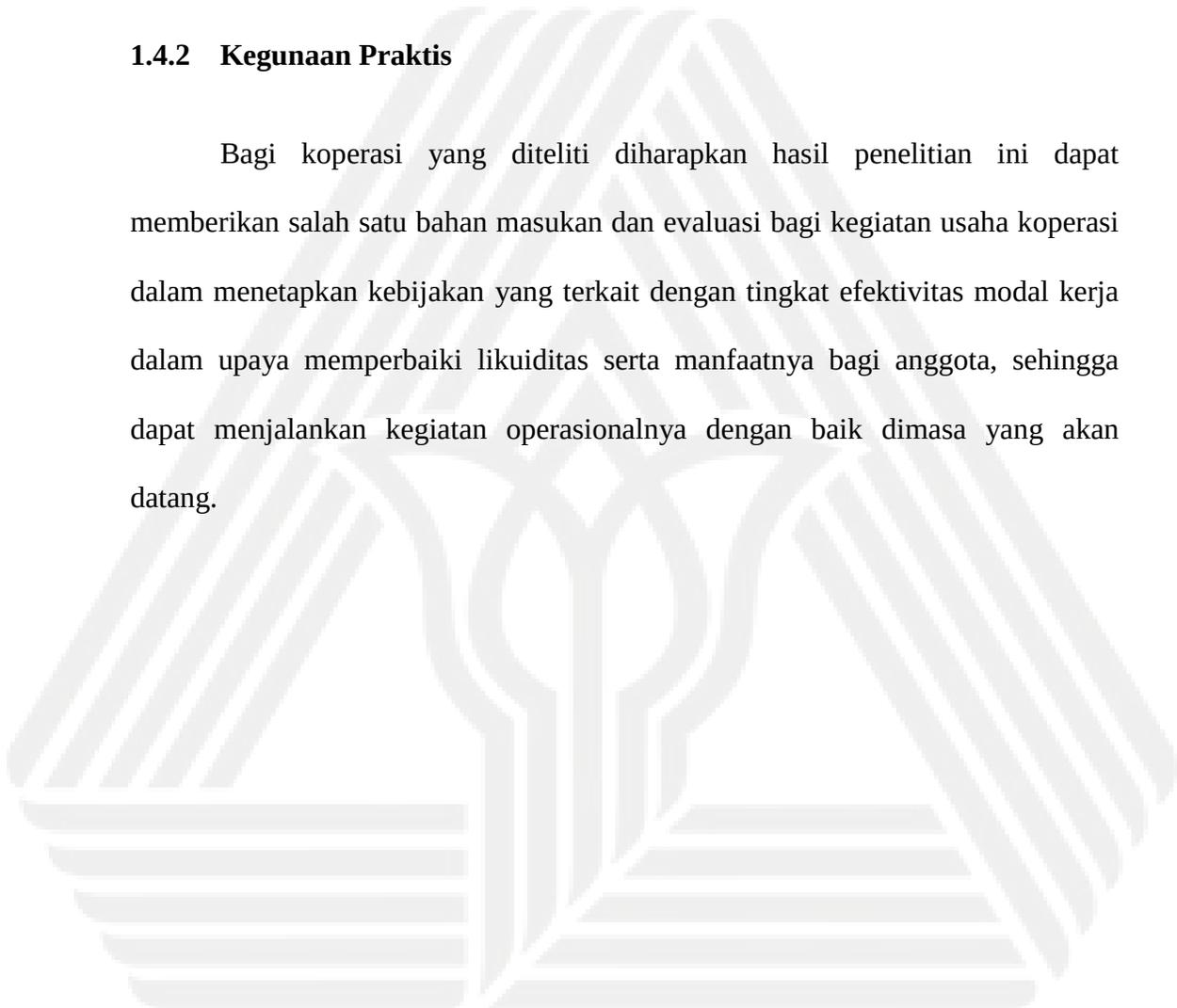
1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang

berhubungan dengan efektivitas penggunaan modal kerja dalam upaya memperbaiki likuiditas serta manfaatnya bagi anggota.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi koperasi yang diteliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi kegiatan usaha koperasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan tingkat efektivitas modal kerja dalam upaya memperbaiki likuiditas serta manfaatnya bagi anggota, sehingga dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dimasa yang akan datang.



IKOPIN